
PENGELOLAAN BIROKRASI KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Drs. Wowon Widaryat, M.Si

*Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sejumlah peraturan dan keputusan telah diterbitkan pemerintah didasari kedua undang-undang di atas. Namun kendati pada pasal 3 UU No.17/2003 dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara "..efisien, ekonomis dan efektif.." namun pada prakteknya begitu banyak peraturan membuat kinerja pemerintah dalam melaksanakan realisasi anggaran belum optimal dan sering kali terjadi hambatan. Sebagai contoh, terbitnya Perpres 54/2010 yang efektif diterapkan pada 2011 ditengarai menurunkan kinerja realisasi anggaran pemerintah tahun 2011 di mana realisasi defisit hanya tercapai 1,27% dari yang ditetapkan APBNP-2011 sebesar 1,7%.

Implikasi lain dari beratnya beban terhadap kinerja pemerintah dapat direfleksikan dari anggaran belanja pegawai. Pada APBN-P 2011, porsi anggaran belanja pegawai mencapai 20,14%. Yang memprihatinkan, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa belanja pegawai daerah yang diambil dari dana alokasi umum (DAU) pusat rata-rata nasional sebesar 57 persen. Beberapa daerah bahkan bisa mencapai 60-80 persen. Dari data ini dapat diambil salah satu hipotesis bahwa beban birokrasi yang besar membuat fokus pekerjaan para pegawai negeri lebih pada administrasi dan birokrasi yang masih dilakukan secara manual. Hal ini diperparah dengan kurangnya secara umum kompetensi PNS yang ada. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan hanya 5% staf PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, sedangkan 95% belum. Sehingga jika diambil kesimpulan kasar, sekian banyak dana hanya untuk membayar PNS mengurus birokrasi, sedangkan dana dan SDM untuk fokus pada esensi pembangunan itu sendiri malah kurang maksimal.

Sebenarnya birokrasi yang kompleks merupakan konsekuensi dari usaha meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan meminimalisir peluang KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di kalangan birokrat. Namun biaya yang dikeluarkan rasanya tidak masuk akal dibandingkan dengan manfaatnya. KKN tetap saja terjadi, karena bengkaknya birokrasi dibarengi struktur gaji yang masih minim sehingga belanja pemerintah yang sampai pada rakyat makin tergerogoti. Di sini menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Mengurangi birokrasi yang kompleks memang dapat menjadi pilihan, namun di saat ini bukanlah pilihan ideal. Hal ini memaksa birokrasi untung melirik pada alternatif lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi, yaitu teknologi informasi.

Sejak tahun 1980-an teknologi informasi telah berkembang sangat pesat, membantu sekian banyak perusahaan dan lembaga menerapkan proses bisnis yang kompleks serta rumit dengan cepat, efisien dan minim keterlibatan manusia. Yang diperlukan adalah investasi pembangunan sistem baik hardware maupun software serta investasi dalam pengembangan SDM pelaksananya. Pemerintah sendiri telah menyadari hal ini, ditandai dengan terbitnya INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov (e-Government atau Pemerintahan Secara Elektronik). Hal ini diteladani setidaknya oleh Kementerian Keuangan yang ditunjukkan dengan munculnya istilah "Teknologi Informasi" pada struktur organisasi Kementerian Keuangan; penggunaan berbagai aplikasi dalam pelayanan administrasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan/pengelolaan perbendaharaan; dan yang terakhir, inisiatif pengembangan sistem informasi terpadu dalam hal pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yaitu SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai inisiatif dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang keuangan dipelopori oleh Direktorat Jenderal MPDM (Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah) sejak tahun 2007 (sekarang Direktorat Jenderal Dikdas), yang telah menghasilkan berbagai produk yang memfasilitasi koordinasi dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas keuangan Ditjen Dikdas khususnya.

PELAPORAN KEUANGAN

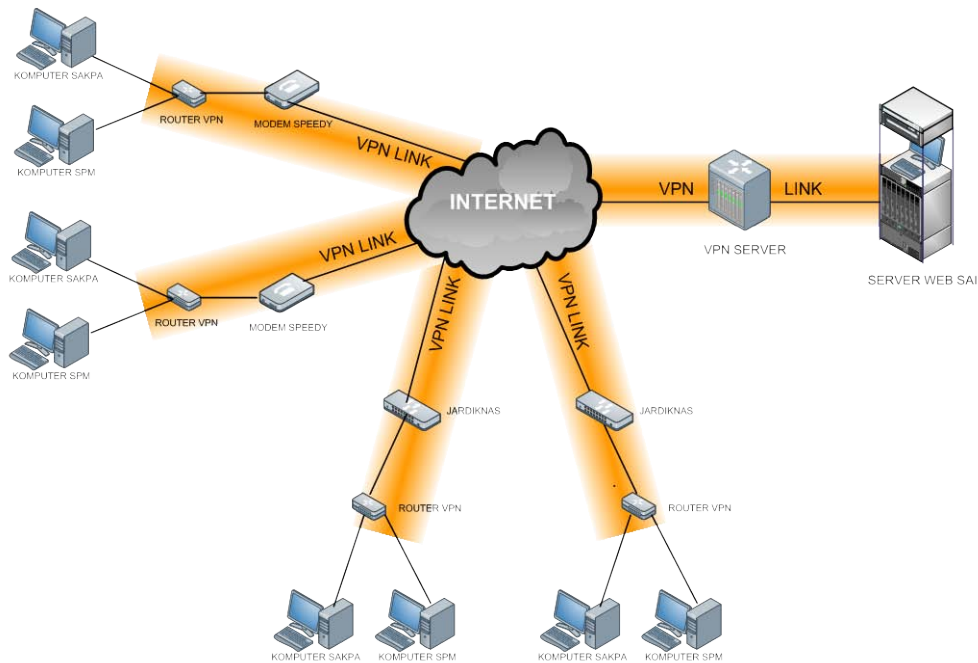
Dalam hal pelaporan keuangan, dalam kurun waktu ini Ditjen Dikdas telah memanfaatkan, mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa produk teknologi informasi di antaranya:

1. SMS Broadcast

SMS Broadcast adalah fasilitas pengiriman SMS ke tujuan banyak nomor ponsel sekaligus baik sesama operator maupun antar operator seluler. Jaringan informasi SMS Broadcast dikembangkan paling awal, dengan tujuan memudahkan komunikasi dengan para operator dan stakeholder jaringan SAI yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan ini bekerja dengan terlebih dahulu mendaftarkan seluruh stakeholder pelaporan SAI untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori. Pesan kemudian disusun melalui suatu file *spreadsheet* untuk kemudian dikirimkan ke aplikasi portal pengiriman SMS yang disediakan provider jasa SMS Broadcast. Provider kemudian secara otomatis mengirimkan pesan sesuai dengan isi excel yang dimaksud

2. Jaringan Privat SAI (VPN SAI Network)

Pengembangan berlanjut dengan digelarnya jaringan SAI atau lebih dikenal dengan SAI Network. Jaringan ini memanfaatkan koneksi internet Jardiknas. Jaringan Privat SAI adalah berbasis VPN (Virtual Private Network) over internet memungkinkan satker yang belum terhubung dengan jardiknas untuk juga bergabung di jaringan ini. Implementasi VPN menggunakan Router VPN dengan teknologi L2TP yang merupakan teknologi VPN yang terenkripsi. Untuk mendampingi Aplikasi SAI Depkeu agar data tersinkronisasi melalui jaringan, dikembangkan pula aplikasi SAINetwork.



GAMBAR 1A. VPN SAI NETWORK



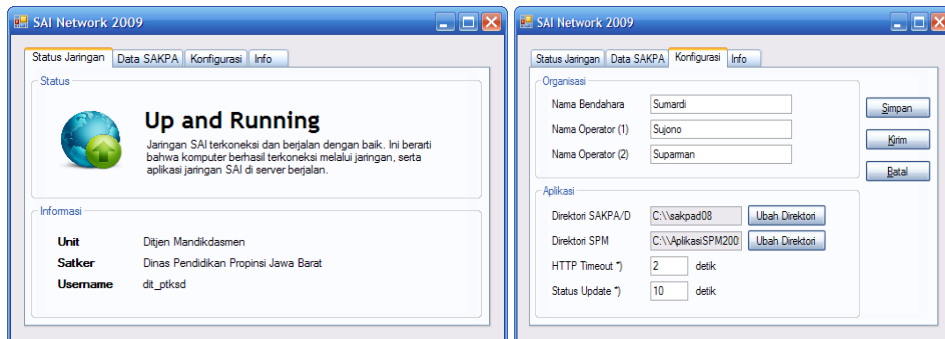
GAMBAR 1.B PETA JARINGAN PELAPORAN KEUANGAN

3. WebSAI

Untuk mengatasi kendala ketepatan waktu, organisasi pengiriman laporan, serta diseminasi hasil laporan ke semua stakeholder, baik eksekutif, inspektorat, pengawas, dan lain-lain diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan mekanisme pelaporan keuangan SAI ini. WebSAI adalah suatu *suite* perangkat lunak yang terdiri dari berbagai aplikasi dalam berbagai media dan platform yang kesemuanya berkaitan tentang Pelaporan Keuangan berbasis Sistem

Akuntansi Instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jaringan Informasi SAI terdiri dari perangkat lunak berikut:

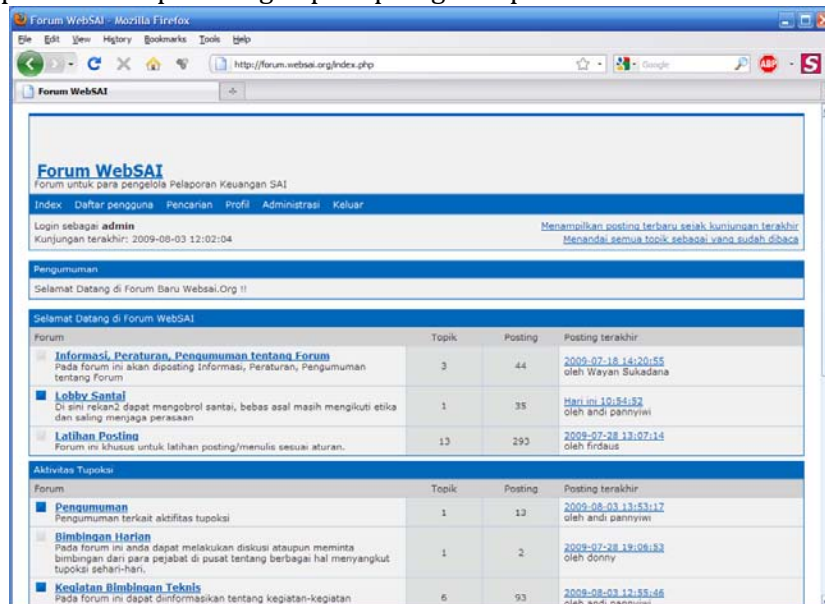
- SAI Network
Aplikasi SAI Network adalah aplikasi berbasis windows, digunakan sebagai media pengiriman untuk meng-update data di Web SAI secara real-time.



GAMBAR 2. APLIKASI SAI NETWORK

Agar pelaksanaan berjalan baik, diadakan bimbingan teknis untuk para operator SAI terkait dengan instalasi Jaringan VPN SAI serta instalasi & penggunaan aplikasi SAI Network

- Forum Web SAI SAI Network
Forum WebSAI adalah perangkat lunak berbasis web yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi dalam forum diskusi. Ini memungkinkan komunikasi intensif antar para operator maupun dengan para petugas di pusat.



GAMBAR 3. FORUM WEBSAI

- Portal Web SAI SAI Network

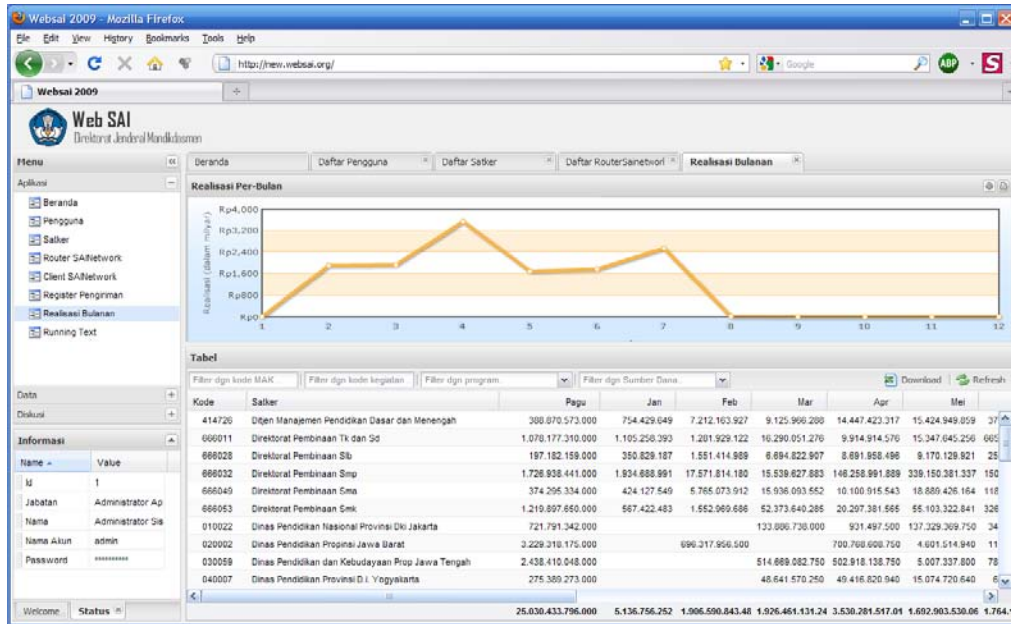
Portal Websai adalah website Portal yang merupakan gerbang masuk ke berbagai Aplikasi SAI. Website ini didesain dengan model seperti portal berita/web log. Website ini difungsikan untuk menggantikan modul berita & peraturan di Websai generasi 1.



GAMBAR 4. PORTAL WEBSAI

- EIS (Executive Information System) SAI SAI Network

Adalah website aplikasi yang merupakan muara dari Sistem Jaringan SAI. Di aplikasi ini dilakukan pengolahan & penampilan data. Aplikasi dibuat bertujuan menggantikan Websai terdahulu. Aplikasi ini ditulis ulang dari awal, menggunakan format database yang lebih baru, yaitu full record (tidak hanya ikhtisar). Website ini difungsikan untuk menggantikan modul Realisasi di Websai generasi pertama. Melalui website ini para stakeholder dapat melakukan berbagai analisis terhadap data pelaporan SAI sebagai dasar mengambil keputusan.



GAMBAR 5. EIS WEBSAI

- SAI Mobile/Blackberry
Adalah aplikasi display data yang kini dikembangkan sebagai bagian dari framework WebSAI. Pada aplikasi ini data ditampilkan secara visual yang terdiri dari data tabular dan grafik, dan dapat dijalankan dan ditampilkan melalui BlackBerry khususnya versi Bold 9000. Melalui aplikasi ini para stakeholder dapat melakukan berbagai analisis terhadap data pelaporan SAI sebagai dasar mengambil keputusan, kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini difungsikan untuk menggantikan SAI Mobile generasi pertama yang dikembangkan di bawah platform Windows Mobile.

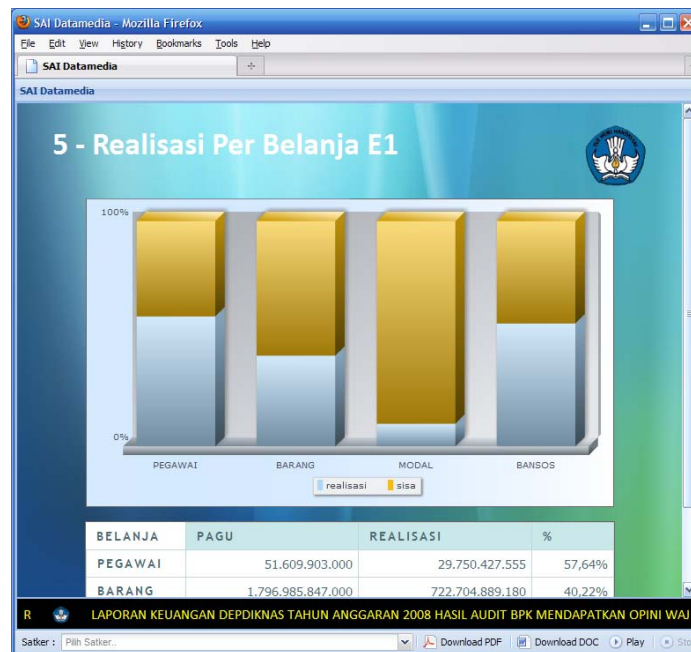


GAMBAR 6. WEBSAI BLACKBERRY

- SAI Digital Media
SAI Digital Media adalah Aplikasi Display yang kini dikembangkan sebagai bagian dari framework Websai 2009. Pada aplikasi ini data ditampilkan secara visual yang terdiri dari

data tabular, grafik, maupun *running text* serta dapat dijalankan dan ditampilkan dalam bentuk presentasi atau TV Display (semacam reklame atau DigitalSignage). Aplikasi ini ditulis ulang dari awal, menggunakan referensi database full record.

Melalui aplikasi ini para stakeholder dapat melakukan berbagai analisis terhadap data pelaporan SAI sebagai dasar mengambil keputusan, dan menjadikannya sebagai bahan presentasi. Aplikasi ini difungsikan untuk menggantikan SAI Multimedia generasi pertama.

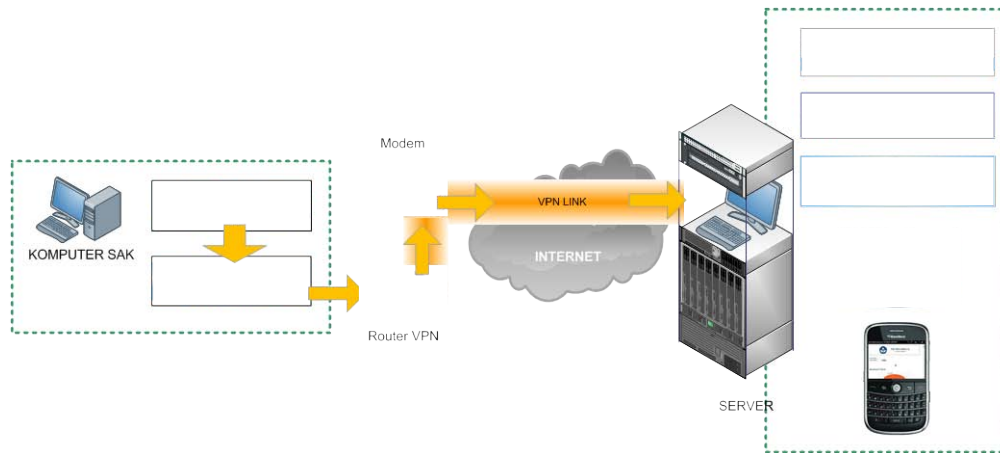


4. Jaringan Komunikasi VoIP SAI

Adalah jaringan telephony/VoIP yang khusus didedikasikan untuk koordinasi demi kelancaran program-program Ditjen Dikdas khususnya di bagian keuangan. Pusat telah menyiapkan infrastruktur server SIP, serta IP Phone di 39 satker, tim teknis dan para pejabat di pusat. Dengan adanya jaringan ini diharapkan komunikasi antara para stakeholder menjadi lebih murah dan praktis, mengingat jarak antara para pelaksana yang sangat berjauhan.

Jaringan komunikasi ini terdiri dari kurang lebih 50 node. Untuk Kantor Pusat terdiri dari 5 node, plus 10 node admin/pejabat pusat. Sedangkan untuk kantor dekonsentrasi terdiri dari 33 node.

Secara keseluruhan berikut diagram arsitektur Sistem SAI Network untuk membantu Pelaporan Keuangan:

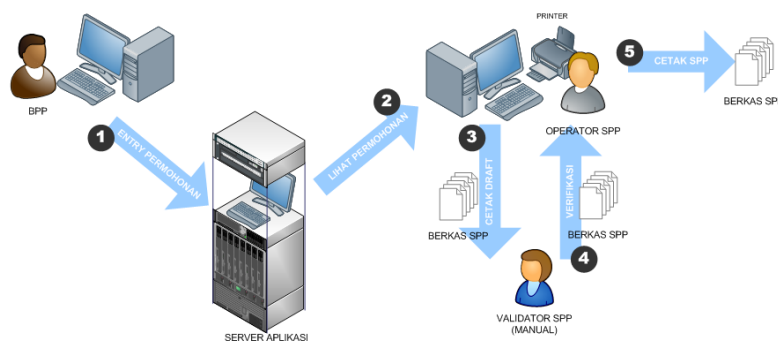


GAMBAR 7. CARA KERJA SAI NETWORK

ADMINISTRASI KEUANGAN

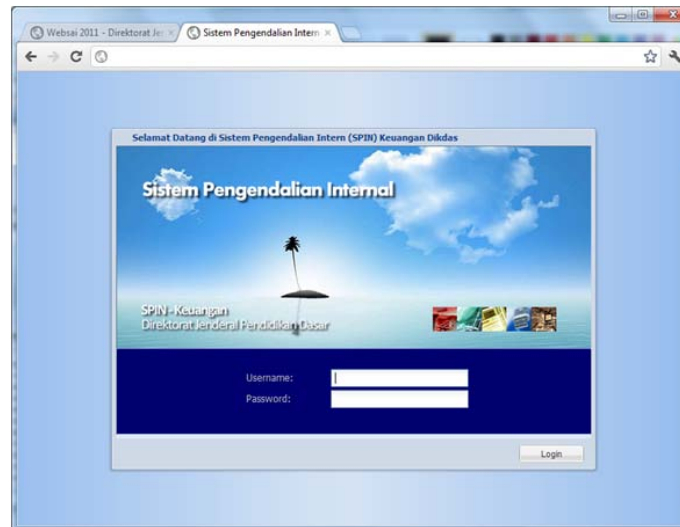
Berbagai inovasi yang dilakukan dalam hal pelaporan keuangan yang tujuannya memberikan berbagai pencegahan terhadap ketidaktaatan asas dan pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara ternyata kurang efektif. Ini disebabkan bahwa pelaporan keuangan adalah sekedar muara dari hasil proses administrasi keuangan. Keberhasilan laporan keuangan mau tidak mau ditentukan oleh ketertiban pelaksanaan serta proses administrasi keuangan berjalan. Oleh karena itu Ditjen Dikdas berinisiatif mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Keuangan (SPIN Keuangan) yang berusaha mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan pada saat prosesnya.

SPIN Keuangan adalah Jaringan, SOP dan Aplikasi terkait dengan proses Pengeluaran & Pengelolaan Anggaran Dana APBN diawali dengan fokus pada pengendalian, penataan administrasi penyusunan & pengesahan SPP. Pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan didasarkan pada data RKAKL.



GAMBAR 8. PROSEDUR PENERBITAN SPP

Aplikasi SPIN adalah aplikasi berbasis web dengan teknologi Web 2.0- Webdesktop, yang merupakan aplikasi dengan interaktifitas tingkat tinggi layaknya aplikasi desktop, diinstal di server pusat.



GAMBAR 9. HALAMAN MUKA SPIN KEUANGAN

Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul besar, di antaranya:

1. Modul Permohonan SPP
2. Modul Manajemen UP/TUP
3. Modul Manajemen Revisi
4. Modul Pembukuan Bendahara

Modul Permohonan SPP

Modul ini berfungsi sebagai antarmuka pengelolaan data Permohonan SPP. Mekanisme Permohonan SPP secara rinci diatur oleh Perdirjen Perbendaharaan No. PER- 66 /PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dimutakhirkan oleh Perdirjen Perbendaharaan No. PER- 11 /PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prosedur Permohonan SPP adalah sebagai berikut :

- Pertama, pemohon melakukan permohonan SPP kepada Bendahara Pengeluaran eselon II masing-masing
- Para Bendahara Pengeluaran menggunakan modul Permohonan TUP untuk melihat semua permohonan TUP yang masuk, meng-approve dan membuatnya menjadi SPP.
- Pemohon (BPP) dapat melihat kolom status dalam Daftar Permohonan TUP sejauh mana proses permohonan TUP berlangsung.

Beranda | Permohonan SPP

Daftar Permohonan SPP

Tambah Permohonan | Ubah Permohonan | Batalkan Permohonan | Rincian | Cetak | Cari Barcode | Refresh

ID	Stat	Updated	Jenis S	Keperluan	Komponen	MAK	Penerima	Jumlah	Pemohon
1	PP	2011/04/07	LS	Pembayaran ATK	PENYUSUNAN BAHAN ASISTENSI	5212	Bendahara Penge	6.000.000	Yama Bayu Aji, :
5	PP	2011/04/07	LS	Pembayaran ATK	PENYUSUNAN BAHAN RENCANA KERJA PEMEI	5212	CV. Angin Segar	5.000.000	Yama Bayu Aji, :
1		2011/04/07	LS	kegiatan	PELAKSANAAN KONSOLIDASI PROGRAM DIKI	5241	0	205.440.000	Yama Bayu Aji, :
1		2011/04/07	LS	kegiatan	PELAKSANAAN KONSOLIDASI PROGRAM DIKI	5212	0		Yama Bayu Aji, :
1		2011/04/07	LS	kegiatan	PELAKSANAAN KONSOLIDASI PROGRAM DIKI	5221	0	75.200.000	Yama Bayu Aji, :

Permohonan SPP (1)

Updated	07 Apr 2011	Pot.PPN	Rp 0
Jenis SPP	LS	Pot.PPN 21	Rp 0
Keperluan	Pembayaran ATK	Pot.PPN 22	Rp 0
SubOutput	Penyusunan Bahan Asistensi	Pot.PPN 23	Rp 0
Jenis Pengeluaran	Pengadaan barang dan atau jasa	Status	PP SPP
Komponen	2009.01.001.011 - PENYUSUNAN BAHAN ASISTENSI	Pemohon	Yama Bayu Aji, SE.
MAK	5212	Homor SPP	11/001/682096/
Jumlah	Rp 6.000.000	Tanggal SPP	
Penerima	Bendahara Pengeluaran	Homor SPP	

Perhatian!! Deadline tidak lanjut telah terlewati 63 jam. (Deadline adalah 24 jam sejak proses terakhir)

GAMBAR 10. MODUL PERMOHONAN SPP

Edit Rincian SPP

Daftar RKA

(00728) PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASIS/SEMINA | BIMBINGAN TEKNIS BENDAHARA DAN PENGELOLAAN

ID	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Anggaran	Realisasi
15161	Uang Harian Peserta [154 ORG x 4 HR]	616	OH	260.000	160.160.000	0%
15162	Uang Penginapan Peserta [154 ORG x 3 HR]	462	OH	300.000	138.600.000	0%
15163	PANITIA					0%
15164	Transport Panitia [15 ORG x 1 KEG]	15	OK	200.000	3.000.000	0%
15165	Uang Harian Panitia [15 ORG x 4 HR]	60	OH	260.000	15.600.000	0%
15166	Uang Penginapan Peserta dan Panitia [15 ORG x 3 HR]	45	OH	300.000	13.500.000	0%
(17 Detil)					618.236.000	

Pilih | Batalkan

Detail Permohonan

Maksimumkan | Kosongkan | Hapus Pilihan

ID	Kode Mak	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
15151	524119	Transport Narasumber Eselon [2 ORG x 1 KEG]	0	OK	200.000	0
15152	524119	Transport Narasumber [2 ORG x 1 KEG]	0	OK	200.000	0
15153	524119	Uang Harian Pengarah dan Narasumber [4 ORG x 4 HR]	0	OH	260.000	0
15154	524119	Uang Penginapan Pengarah dan Narasumber [4 ORG x 3 HR]	0	OH	300.000	0
15156	524119	Transport Peserta DKI [3 ORG x 1 PROP]	0	OK	200.000	0
15157	524119	Transport peserta dalam Jawa Luar DKI [3 ORG x 5 PROP]	0	OK	900.000	0
15158	524119	Transport peserta luar Jawa [3 ORG x 27 PROP]	0	OH	2.900.000	0
15159	524119	Transport Peserta Pusat [55 ORG x 1 KEG]	0	OK	200.000	0

Rp NaN | Simpan | Batal

GAMBAR 11. PEMILIHAN ITEM ANGGARAN

Modul Manajemen UP/TUP

Dalam administrasi pembayaran dari APBN, dikenal istilah UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan). Ini dijabarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mekanisme UP/TUP sedikit unik, dan ini terkait erat dengan pengadministrasian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara.

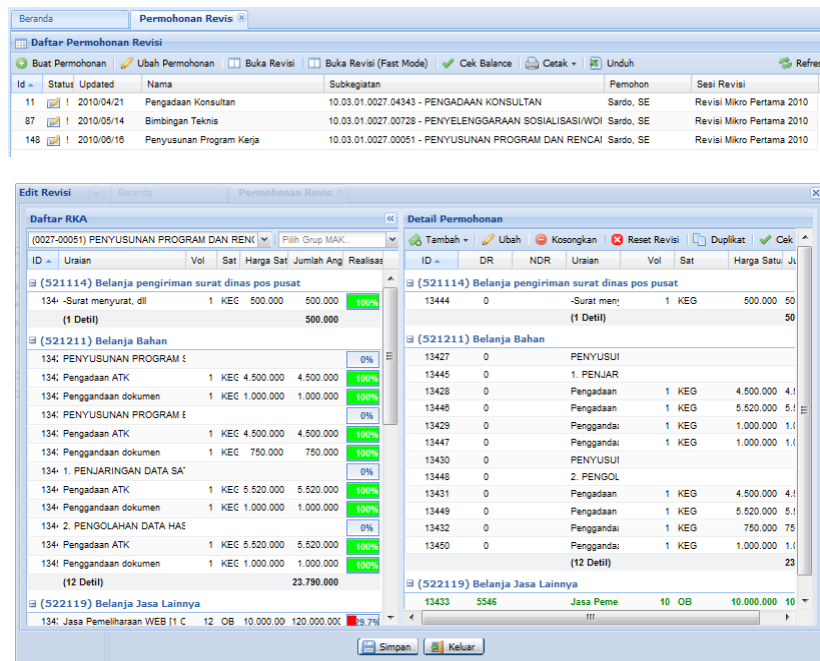
Modul Manajemen UP/TUP ini berfungsi sebagai antarmuka pengelolaan Manajemen UP/TUP. User yang dapat memanfaatkan modul ini hanyalah BP Eselon I dan BP Eselon II (Sekretariat/Direktorat). Pada modul ini dapat dilihat SPP TUP yang telah dibuat pada modul sebelumnya, dan dapat pula dibuat SPP UP.

Modul Manajemen Revisi

Peraturan Revisi APBN diterbitkan setiap tahun anggaran. Misalnya untuk tahun 2011, diterbitkan dua peraturan tentang revisi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Aplikasi SPIN keuangan menggunakan data RKAKL dalam melakukan input SPP. Penerbitan SPP tentu saja harus selalu mengacu pada data RKAKL terakhir. Oleh karena itu dikembangkanlah Modul Manajemen Revisi yang berfungsi sebagai antarmuka input revisi anggaran. Prosedur Revisi yang disusun sebagai pendamping modul ini adalah sebagai berikut :

- Pertama, pemohon melakukan permohonan revisi kepada bagian anggaran eselon II
- Pihak anggaran menggunakan modul Permohonan revisi untuk melihat semua permohonan revisi yang masuk, bilamana sesuai dan sudah di setujui oleh yang berwenang maka pihak anggaran dapat meng-approve permohonan tersebut di aplikasi.
- Pemohon (BPP) dapat melihat kolom status dalam Daftar Permohonan revisi sejauh mana proses permohonan revisi berlangsung.



GAMBAR 12. MODUL MANAJEMEN REVISI

Modul Pembukuan Bendahara

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan No.73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja yang mengatur penatausahaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran (BP) ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Peraturan ini menuntut adanya mekanisme pembukuan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran

kas di BP/BPP serta penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas tersebut kepada Kementerian Keuangan.

Modul dikembangkan sebagai antarmuka penatausahaan kas mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No.47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Sistem mencatat beberapa transaksi secara otomatis, dan membantu bendahara menginput transaksi lainnya. Sistem secara otomatis menampilkan berbagai buku pembantu sesuai dengan hasil input transaksi.

BUKU KAS UMUM
PER 23/5/2012

Kementerian/Lembaga : (023) Kementerian Pendidikan Nasional
 Unit Organisasi : (03) DITJEN DIKAS
 Satuan Kerja : (414726) SETDITJEN DIKAS
 Provinsi/Kabupaten/Kota : DKI Jakarta
 Tgl/No Sck Pengangkatan :
 1.BPP :
 2.PPKK :
 Tahun Anggaran :

Tanggal	No. BUKU	Uraian	D	K	Saldo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19/04/12	989	Penerimaan Dana TUP dari BP - Komponen 2005.006.001.013 MAK S21213		7.200.000	0 7.200.000
19/04/12	990	Penerimaan Dana TUP dari BP - Komponen 2005.006.001.013 MAK S21219		10.350.000	0 17.550.000

GAMBAR 13. PENCETAKAN BUKU KAS UMUM

PENGEMBANGAN SAAT INI DAN KE DEPAN

Pelaporan Keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, rencana pengembangan ke depan di antaranya :

- Pengembangan akses reporting melalui perangkat Tablet Android / iPad
 Saat ini tengah munculnya tren perangkat teknologi berupa tablet dengan bermacam sistem operasi. Dua yang paling populer saat ini adalah iPad dari Apple dan Android dari Google. Tablet ini cukup akrab di kalangan pimpinan, karena memudahkan menyangkut keperluan-keperluan informasi dan komunikasi. Bagian Keuangan Ditjen Dikdas merencanakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis iPad dan/atau Android untuk memberi akses para pimpinan terhadap data-data ini.
- Pengembangan otomatisasi pengisian ADK hasil upload ke dalam kompilasi eselon I.
 Otomatisasi input ADK kepada kompilasi eselon I diperlukan untuk mempermudah operator eselon I untuk menyusun anggarannya.
- Pengembangan otomatisasi penyusunan template laporan akuntansi & CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
 Sebagian besar data yang dicantumkan dalam CALK merupakan data dari Aplikasi SAK. Oleh karena itu data CALK dapat diotomatisasi, sehingga kompilasi ke dalam CALK Pusat lebih mudah.

Administrasi Keuangan

Dalam hal administrasi keuangan, ditemukan berbagai kendala yang pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya diakibatkan kurangnya penegakan prosedur dalam proses bisnis keuangan. Oleh karena itu pada tahun ini dan ke depan direncanakan penguatan prosedur keuangan.

Prosedur yang akan disempurnakan dan dikuatkan pelaksanaannya di antaranya :

- **SOP Pencairan Anggaran**
SOP ini diuraikan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER- 66 /PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dimutakhirkan oleh Perdirjen Perbendaharaan No. PER- 11 /PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prosedur disesuaikan dengan lingkungan kerja di Ditjen Dikdas serta penerapan teknologi informasi yang menyertainya
- **SOP Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran**
SOP ini diuraikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja serta pelaksanaannya pada Perdirjen Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- **SOP Revisi Anggaran**
SOP ini diuraikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012. Modul aplikasi Revisi anggaran pun perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut.
- **SOP Pelaporan Keuangan**
SOP ini diuraikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang dilengkapi dengan prosedur-prosedur sesuai dengan inovasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dikdas.

Sedangkan di sisi aplikasi, pengembangan saat ini dan ke depan untuk SPIN Keuangan di antaranya:

- **Penyesuaian format basis data sesuai dengan format PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja).**
Kementerian keuangan dalam hal reformasi di bidang anggaran telah menerapkan beberapa pendekatan dalam penyusunan APBN. Pendekatan yang dimaksud di antaranya pendekatan penganggaran terpadu (Unified Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF), dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting (PBB). Disamping penerapan tiga pendekatan, anggaran belanja negara juga diwajibkan untuk dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Selang beberapa tahun, format klasifikasi dan nomenklatur APBN berubah, yang terakhir adalah PBK. Sistem Pengendalian Keuangan harus dapat mengikuti setiap perubahan yang terjadi.
- **Pengembangan Modul Pengendalian Perjalanan Dinas.**
BPK dalam dua tahun belakangan ini fokus menyoroti pelanggaran dalam pelaksanaan APBN terkait perjalanan dinas. Cukup banyak temuan yang dilaporkan BPK, dan sebagian muncul

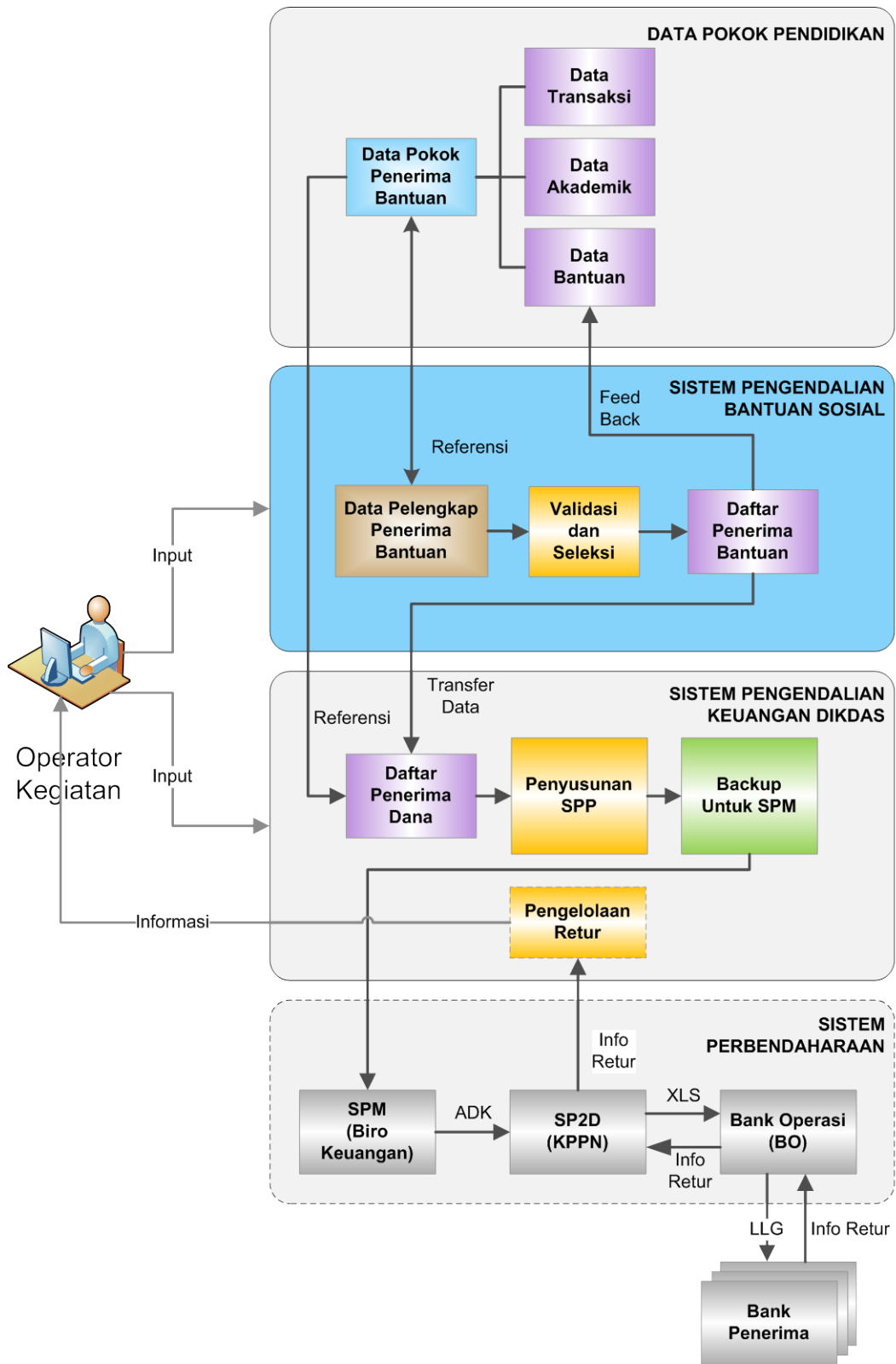
berupa sanksi berupa pengembalian dana. Untuk itu Sistem Pengendalian Perjalanan Dinas ini dikembangkan untuk meminimalisir temuan terkait Perjalanan Dinas.

- Pengembangan Modul Pengendalian Perpajakan.
Kurang taatnya kementerian/lembaga dalam hal perpajakan khususnya PPh 21 menjadi salah satu poin yang berulang-ulang muncul dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK). Sebenarnya dengan terbitnya UU No.36 / 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, mekanisme perhitungan PPh 21 sudah lebih disederhanakan. Namun prakteknya ketertiban pencatatan, penerbitan bukti potong dan penyetoran PPh 21 masih kurang maksimal, ditengarai oleh volume SPPD yang sangat besar di Kementerian/Lembaga. Ditjen Dikdas mencoba memelopori peningkatan ketertiban pelaksanaan pajak diawali oleh PPh 21.
- Pengembangan Modul Perencanaan Kegiatan untuk mendukung Perencanaan Kas.
Perencanaan kas dicanangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Karena belum terpadunya basis data keuangan, aplikasi perencanaan kas yang telah diterbitkan Kemenkeu memerlukan banyak sekali input. Dengan Modul Manajemen Kegiatan yang dikembangkan di dalam SPIN Keuangan, sistem ini diharapkan mempercepat input dan keluaran yang diminta oleh AFS.
- Penyempurnaan Modul Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Bendahara.
Dengan adanya paradigma perencanaan kegiatan serta modul perpajakan yang mengotomatisasi perencanaan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan, maka ada implikasinya terhadap Modul Pembukuan/LPJ Bendahara. Ditjen Dikdas beserta tim pengembang IT berupaya terus untuk menyempurnakan modul ini agar semua modul terintegrasi dengan baik dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- Pengembangan dan Penyempurnaan E-Document.
Konsep E-Document secara generik telah diterapkan pada SPIN Keuangan versi 2011. Dengan paradigma Perencanaan Kegiatan yang lebih memudahkan pengelolaan perencanaan pengeluaran dana, pelaporan pembukuan dan pajak serta pelaporan dokumentasi, maka E-Document dikembangkan menyesuaikan dengan konsep Manajemen Kegiatan.
- Pengembangan Modul Keterbukaan Informasi Publik.
UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah terbit, namun prakteknya masih belum maksimal. Reformasi memberikan ruang pada transparansi, keleluasaan media, peluang pada masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga pengawas. Namun di lapangan, justru banyak oknum media dan LSM yang melakukan pemerasan terhadap birokrasi bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Ini yang memunculkan buah simalakama atas keterbukaan informasi. Sampai titik mana informasi dapat dibuka, sedemikian hingga tidak dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum. Modul KIP dalam SPIN berusaha memenuhi amanat UU 14/2008 dengan tetap memperhatikan aspek-aspek di atas.
- Penanganan Retur Bantuan Sosial
Sebagaimana diungkapkan pada website Ditjen Dikdas, bahwa dalam penyaluran bantuan sosial ada suatu problem yang cukup mengganggu yaitu masalah retur. Retur adalah ditolaknya pengiriman dana pada suatu bank yang dikarenakan beberapa hal antara lain: 1) kesalahan

pada nomor rekening; 2) kesalahan pada nama penerima - terjadi pada bank yang menerapkan sistem komputasi otomatis pada penerimaan transfer/kliring; 3) telah non-aktifnya rekening penerima bantuan yang bersangkutan. Ini terjadi karena setelah dana disalurkan ke rekeningnya, penerima bantuan cenderung mengambil semaksimal mungkin sehingga sisanya tinggal sedikit atau melewati batas minimum. Jika demikian, nomor rekening terancam mati. Ketika dana kembali disalurkan ke nomor rekening tersebut, nomor tersebut sudah mati sehingga terjadi retur.

Solusi yang diusulkan adalah adanya kerjasama dari 3 sistem informasi, yaitu Sistem Data Pokok Pendidikan, Sistem Informasi Pengendalian Bantuan Sosial serta Sistem Pengendalian Internal Keuangan Ditjen Dikdas untuk menghasilkan data yang inline dari mulai pengambilan data pokok, penambahan atribut nomor rekening dll, pemilihan penerima tunjangan, otomatisasi penyusunan daftar penerima di Sistem Pengendalian Keuangan, Penyusunan Lampiran SPM sampai pada Pengelolaan Retur.

Berikut gambaran interkoneksi antar aplikasi yang memungkinkan pengelolaan retur.



GAMBAR 14. INTERKONEKSI ANTAR APLIKASI UNTUK PENANGANAN RETUR

- Integrasi dengan SPAN / SAKTI
SPAN dan SAKTI adalah sistem terpadu yang dibuat Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan keuangan negara. SPAN dan SAKTI masih dalam proses pengembangan. Ke depan, SAKTI akan menggantikan berbagai aplikasi yang ada saat ini, yaitu RKAKL/DIPA, SPM, SAI dan SABMN. SPIN harus bisa mendukung SAKTI dan melengkapi dengan kebutuhan pengendalian yang dituntut satker.

PENUTUP

Bagian Keuangan Ditjen Dikdas telah melaksanakan pengembangan berbagai terobosan dan inovasi berbasis Teknologi Informasi dengan memanfaatkan perkembangan yang terkini. Berbagai upaya akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaporan dan pengendalian keuangan, dengan berusaha selalu mengikuti perubahan-perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan.